

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN KEMANDIRIAN
FISKAL TERHADAP IPM DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
LAMPUNG PADA TAHUN 2014-2023**



Skripsi Oleh:

HANA SEPTINA BR MARBUN

01021182126014

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**“PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN KEMANDIRIAN
FISKAL TERHADAP IPM DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
LAMPUNG PADA TAHUN 2014-2023”**

Disusun Oleh :

Nama : Hana Septina Br Marbun

NIM : 01021182126014

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

Tanggal : 25 Februari 2025

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Sukanto, S.E., M.Si
N/P. 197403252009121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN KEMANDIRIAN FISKAL TERHADAP IPM DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG PADA TAHUN 2014-2023

Disusun oleh :

Nama : Hana Septina Br Marbun

NIM : 01021182126014

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Maret 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 2 Mei 2025

Pembimbing,

Penguji,



Dr. Sukanto, S.E., M.Si

NIP. 197403252009121001



Dwi Darma Puspita Sari, S.E., M.Si

NIP. 199411122024212001

Mengetahui,

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
8-5-2025



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hana Septina Br Marbun
NIM : 01021182126014
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Belanja Pemerintah dan Kemandirian Fiskal terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2014-2023.

Pembimbing : Dr. Sukanto, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 19 Maret 2025

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 6 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 8-5-2025
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Hana Septina Br Marbun

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa”

-Roma 12 : 12

“Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai”

-Mazmur 126 : 5

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

-Filipi 4 : 6

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Tuhan Yesusku
- Ayah dan Ibuku tercinta
- Adik-adikku dan keluarga besarku
- Sahabat dan teman-temanku
- Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Belanja Pemerintah dan Kemandirian Fiskal terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2014-2023” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas sejauh mana belanja pemerintah dan kemandirian fiskal sebagai tujuan utama dari otonomi daerah dapat mempengaruhi IPM di kabupaten/kota Provinsi Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi seluruh pihak yang membacanya.

Indralaya, 6 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,



Hana Septina Br Marbun

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi. Namun, berkat bimbingan, dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dalam apapun kondisi saya. Karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya bersyukur karena adanya proses yang tidak mudah dalam pengerjaan skripsi ini, saya semakin didewasakan dan menjadi semakin dekat dengan Tuhan.
2. Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Pardamean Marbun dan Ibu Dorma Manalu yang tiada henti-hentinya berdoa dan bekerja keras demi pendidikan anak-anaknya, serta selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.
3. Ketiga adik-adikku, Luga Salomon Marbun, Roland Alvian Marbun dan Friska Cisilia Marbun yang selalu menghibur dan menguatkan penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa., S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya, tempat saya mengabdikan sebagai mahasiswa.
5. Bapak Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku Dosen pembimbing saya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dwi Darma Puspita Sari, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang sudah membantu memberikan saran dan masukan untuk skripsi saya.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu

selama perkuliahan kepada saya.

10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.
11. Kepada seluruh teman-teman yang telah menemani selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman BANIS terima kasih telah menjadi tempat bercerita dan terus memberikan dukungan kepada saya.

Indralaya, 6 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hana Septina Br Marbun', with a stylized flourish at the end.

Hana Septina Br Marbun

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN KEMANDIRIAN FISKAL TERHADAP IPM DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG PADA TAHUN 2014-2023

Oleh:

Hana Septina Br Marbun, Sukanto

Belanja pemerintah dan kemandirian fiskal merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dalam era otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah dan kemandirian fiskal terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Lampung. Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) dengan rentang waktu sepuluh tahun dari tahun 2014-2023. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan kemandirian fiskal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Lampung. Temuan ini menyoroti pentingnya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja dan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : IPM, Belanja Pemerintah, Kemandirian Fiskal

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Pembimbing,



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND FISCAL INDEPENDENCE ON HDI IN DISTRICTS/CITIES OF LAMPUNG PROVINCE IN 2014-2023

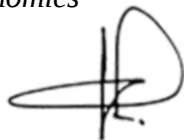
By:

Hana Septina Br Marbun, Sukanto

Government spending and fiscal independence are two things that cannot be separated in efforts to improve the quality of human life in the era of regional autonomy. This study aims to analyze the effect of government spending and fiscal independence on the human development index in districts/cities in Lampung Province. The research data comes from the Central Statistics Agency (BPS) of Indonesia and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) with a ten-year period from 2014-2023. The analysis technique used is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results of this study indicate that government spending and fiscal independence have a significant positive effect on the Human Development Index in districts/cities in Lampung Province. This finding highlights the importance of the government in increasing the efficiency and effectiveness of spending and strengthening regional fiscal independence by increasing Regional Original Revenue.

Keywords: HDI, Government Spending, Fiscal Independence

*Acknowledge,
Head of The Department of Development
Economics*



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Supervisor,



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Hana Septina Br Marbun

NIM : 01021182126014

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Mata Kuliah : Keuangan Daerah

Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Pemerintah dan Kemandirian Fiskal terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2014-2023.

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk di tempatkan pada lembar abstrak.

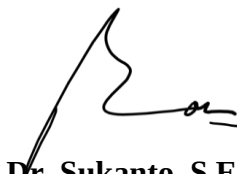
Indralaya, 6 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Pembimbing,



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hana Septina Br Marbun
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Prabumulih, 09 September 2003
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jalan Lingkar, Kota Prabumulih
Email : hanamarbun090903@gmail.com

Pendidikan Formal

2008 – 2009	:TK Xaverius Bandar Lampung
2009 – 2015	:SD Santa Maria Prabumulih
2015 - 2018	:SMP Santa Maria Prabumulih
2018 – 2021	:SMA Negeri 6 Prabumulih
2021 – 2025	:S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Pengalaman Organisasi

- Staff Ahli Divisi Education IMEPA 2023-2024
- Staff Muda Divisi Education IMEPA 2022-2023
- Anggota Departemen PPSDM KMP UNSRI 2021

Pengalaman Magang

- Peserta Magang Bank Sumsel Babel Kapten A. Rivai 2024 (1 bulan)
- Peserta Magang Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur
- Kementerian Keuangan 2024-2025 (2 bulan)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Adolf Wagner.....	11
2.1.2 Teori Rostow dan Musgrave.....	13
2.2 Telaah Konseptual.....	13
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	13
2.2.2 Belanja Pemerintah (Daerah).....	16

2.2.3	Kemandirian Fiskal.....	17
2.3	Penelitian Terdahulu.....	19
2.4	Kerangka Pemikiran	24
2.5	Hipotesis Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....		26
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	26
3.2	Jenis dan Sumber Data	26
3.3	Teknik Analisis Data	27
3.3.1	Estimasi Regresi Data Panel	28
3.3.2	Uji Kesesuaian Model.....	29
3.3.3	Uji Asumsi Klasik.....	31
3.3.4	Uji Statistik	33
3.4	Definisi Operasional Variabel	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Gambaran Umum Penelitian	36
4.1.1	Kondisi Geografis dan Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	36
4.1.2	Gambaran Umum Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.....	37
4.1.3	Gambaran Umum Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	46
4.1.4	Gambaran Umum Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	49
4.2	Hasil Pengolahan Data	52
4.2.1	Statistik Deskriptif	52
4.2.2	Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	54
4.2.3	Pemilihan Model Terbaik	55
4.2.4	Uji Asumsi Klasik.....	60
4.2.5	Uji Statistik	62
4.3	Pembahasan	64
4.3.1	Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	64

4.3.2	Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	66
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN.....		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN		75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2019-2023.....	3
Tabel 1.2 Belanja Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2023 (Miliar Rupiah)	6
Tabel 1.3 Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	8
Tabel 2.1 Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah	19
Tabel 4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2014-2023.....	38
Tabel 4.2 Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2014-2023.....	41
Tabel 4.3 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2023.....	43
Tabel 4.4 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2023 (Ribu Rupiah).....	45
Tabel 4.5 Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2023	47
Tabel 4.6 Perkembangan Kemandirian Fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2023	49
Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Chow.....	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman	56
Tabel 4.11 Hasil Regresi dengan Fixed Effect Model	57
Tabel 4.12 Nilai Cross Section dan Nilai Intersep	59
Tabel 4.13 Uji Asumsi Klasik Dalam Regresi Data Panel.....	60
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4.15 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	62
Tabel 4.16 Hasil Uji F	62
Tabel 4.17 Hasil Uji t	63
Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2018-2023	4
Gambar 2.1 Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah.....	12
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Lampung.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Indeks Pembangunan Manusia.....	75
Lampiran 2. Data Belanja Pemerintah (Dalam Milliar Rupiah)	76
Lampiran 3. Data Indeks Kemandirian Fiskal	77
Lampiran 4. Data Belanja Pemerintah Dalam Bentuk LOG.....	78
Lampiran 5. Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model	78
Lampiran 6. Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model.....	79
Lampiran 7. Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model	80
Lampiran 8. Hasil Uji Chow	81
Lampiran 9. Hasil Uji Hausman.....	82
Lampiran 10. Uji Heterokedasitas	83
Lampiran 11. Uji Multikolinieritas	83
Lampiran 12. Hasil Statistik Deskriptif	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dilakukan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang adil dan sejahtera. Baik pembangunan fisik maupun non fisik keduanya dirancang agar dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup warga negaranya. Menurut Winarti *et al.* (2022), manusia merupakan bagian dari kekayaan negara. Kualitas sumber daya manusia yang baik menjadi faktor fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas dan kemampuan untuk menghadapi tantangan global dimasa depan.

Dalam signifikansinya, ukuran yang dipakai dalam menilai keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi pada manusia adalah dengan melihat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka yang telah dikembangkan oleh badan pembangunan internasional PBB yakni UNDP (*United Nation Development Programme*) ini didasarkan pada empat indikator utama, yakni: harapan hidup, rata-rata jenjang sekolah untuk penduduk usia dewasa dan harapan bersekolah, serta *Purchasing Power Parity* sebagai ukuran daya beli masyarakat. IPM yang mencerminkan kualitas hidup manusia menjadi komponen penting dalam penentuan kebijakan publik. Dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah menggunakan angka ini sebagai komponen dasar selain dari luas wilayah, jumlah penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi (IHK) dan PDRB per kapita secara berkala (Palayukan, 2019).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia terutama agar seluruh masyarakat dapat merasakan kesejahteraan secara merata. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan berlaku hingga saat ini adalah memberlakukan sistem desentralisasi. Kebijakan ini merupakan hasil perubahan dari sistem sentralisasi yang pernah dianut pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga tumbangannya masa orde baru pada tahun 1998 (Rusydi et al., 2022). Perubahan sistem sentralisasi menuju desentralisasi didasarkan pada faktanya bahwa sistem sentralisasi tidak mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Sistem pemerintahan yang terpusat atau sentralisasi menyebabkan pemerintah hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga berakibat pada ketidakmerataan pembangunan regional antara wilayah di Pulau Jawa dengan wilayah di luar Pulau Jawa (Ayu et al., 2024). Dengan diberlakukannya sistem desentralisasi di Indonesia maka diharapkan akan memberikan pemerataan fungsi pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai perbaikan dari kekurangan sistem sebelumnya.

Penerapan sistem desentralisasi di Indonesia telah membuat pemerintah daerah mempunyai peranan dan tanggung jawab yang semakin besar untuk mengelola daerahnya terutama agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilandaskan pada gagasannya bahwa untuk mencapai pemerataan pembangunan dan menentukan program atau kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan pengelolaan yang lebih dekat dengan masyarakat itu sendiri (Tinambunan, 2022).

Salah satu provinsi di Indonesia yang juga turut serta dalam memantapkan pembangunan wilayahnya dan melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan sebuah wilayah dengan 2 kota dan 13 kabupaten yang terletak di Pulau Sumatera. Adapun kondisi kualitas hidup manusia yang diukur melalui IPM adalah sebagai berikut:

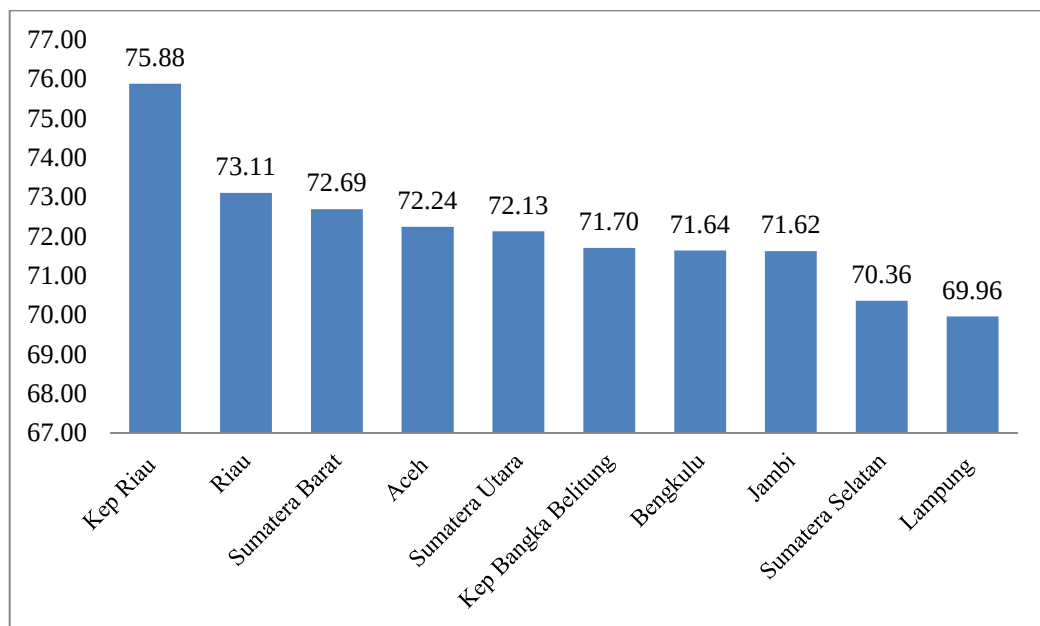
Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Metro	76,77	77,19	77,49	77,89	78,36
Bandar Lampung	77,33	77,44	77,58	78,01	78,56
Lampung Timur	69,34	69,37	69,66	70,58	71,21
Lampung Selatan	68,22	68,36	68,49	69,00	69,63
Pesisir Barat	63,79	63,91	64,30	65,14	66,00
Tulang Bawang Barat	65,93	65,97	66,22	67,13	67,81
Tulangbawang	68,23	68,52	68,73	69,53	70,02
Way Kanan	67,19	67,44	67,57	68,04	68,63
Tanggamus	66,37	66,42	66,65	67,22	67,86
Lampung Barat	67,50	67,80	67,90	68,39	69,11
Pringsewu	69,97	70,30	70,45	70,98	71,61
Pesawaran	65,75	65,79	66,14	66,70	67,67
Lampung Utara	67,63	67,67	67,89	68,33	68,95
Lampung Tengah	70,04	70,16	70,23	70,80	71,60
Mesuji	63,52	63,63	64,04	64,94	65,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Tabel 1.1 memperlihatkan angka IPM di kabupaten/kota Provinsi Lampung secara keseluruhan meningkat setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2019-2023 dapat terlihat bahwa Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan daerah yang memiliki angka IPM tertinggi sedangkan daerah yang memiliki angka IPM terendah berada di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat. Hanya enam kabupaten/kota yang menunjukkan angka IPM tergolong tinggi atau berada di atas 70% sedangkan sembilan wilayah lainnya tergolong pada tingkat

IPM yang sedang. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan atau belum meratanya kualitas hidup manusia terutama di antar wilayah kabupaten dan kotanya.



Gambar 1.1 Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Secara regional, jika disandingkan dengan sembilan provinsi lainnya yang berada di Pulau Sumatera terlihat bahwa daerah dengan angka IPM tertinggi berada di Kepulauan Riau dengan rata-rata IPM sebesar 75,88, sedangkan Provinsi Lampung menjadi daerah dengan angka IPM terendah dengan rata-rata IPM sebesar 69,96. Dapat diketahui pula bahwa jika dirata-ratakan sembilan provinsi di Pulau Sumatera telah tergolong pada IPM tinggi. Hanya Provinsi Lampung yang menunjukkan wilayah dengan angka IPM tergolong sedang. Hal inilah yang menjadi perhatian bahwa nyatanya tingkat kualitas hidup manusia di

Provinsi Lampung masih tertinggal diantara sembilan provinsi lainnya yang berada di Pulau Sumatera.

Perbaikan kualitas hidup manusia tidak dapat lepas dari tanggung jawab pemerintah. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, menjadikan pemerintah daerah memiliki kuasa untuk merancang alokasi belanja daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. IPM memberikan cerminan pada kualitas hidup manusia melalui beberapa dimensi seperti standar hidup yang layak, tingkat pengetahuan, dan kesehatan (BPS, 2021). Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan alokasi anggaran memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan program-program yang dapat mendorong kemajuan di ketiga dimensi tersebut.

Tata kelola APBD yang baik juga menjadi pendorong dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif (Irfan et al., 2024). Penggunaan alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien akan memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendukung pemerataan pembangunan diseluruh wilayah. Dengan terlaksananya hal tersebut, maka kedepan diharapkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, terutama berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia (Hidayat & Woyanti, 2021).

Menurut Setiawan & Fikriah (2020) dalam penelitiannya, semakin besar belanja pemerintah akan berdampak terhadap perbaikan indeks pembangunan manusia. Pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran melalui penyediaan fasilitas publik kedepannya akan dapat mengurangi ketimpangan sehingga perbaikan kualitas hidup manusia diseluruh wilayah dapat tercapai.

Tabel 1.2 Belanja Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2023 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Metro	927,1	946,9	928,1	919,3	983,3
Bandar Lampung	2.294,7	2.127,5	2.018,4	2.273,6	2.277,7
Lampung Timur	2.132,7	2.129,4	2.194,4	2.064,3	2.096,2
Lampung Selatan	2.279,6	2.228,1	2.168,0	2.265,8	2.158,3
Pesisir Barat	831,6	837,5	815,8	768,6	768,9
Tulang Bawang Barat	946,9	939,6	936,9	840,8	789,9
Tulang Bawang	1.188,3	1.157,9	1.181,5	1.223,2	1.306,6
Way Kanan	1.398,9	1.239,2	1.224,6	1.298,5	1.347,0
Tanggamus	1.712,0	1.648,6	1.658,2	1.723,9	1.566,6
Lampung Barat	1.122,3	984,6	1.025,3	1.081,6	984,4
Pringsewu	1.206,2	1.168,1	1.267,0	1.211,0	1.192,3
Pesawaran	1.279,7	1.275,9	1.230,5	1.263,1	1.227,6
Lampung Utara	1.775,7	1.652,4	1.623,1	1.737,3	1.585,6
Lampung Tengah	2.588,8	2.470,0	2.546,8	2.618,0	2.513,7
Mesuji	895,1	822,0	873,3	879,4	861,1

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2024

Tabel 1.2 memperlihatkan belanja pemerintah di kabupaten/kota Provinsi Lampung yang cukup berfluktuatif setiap tahunnya. Dapat terlihat dengan cukup signifikan bahwa selama tahun 2019-2023 Kabupaten Lampung Tengah menjadi daerah dengan belanja pemerintah tertinggi dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kemudian disusul oleh Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung. Disamping itu, Kabupaten Pesisir Barat menjadi daerah dengan tingkat belanja pemerintah terendah yang kemudian disusul oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Realisasi belanja yang dikeluarkan pemerintah menjadi gambaran keseriusan pemerintah dalam mendanai pembangunan daerah diseluruh wilayah.

Selain belanja pemerintah, kemandirian daerah sebagai wujud dari kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat mempengaruhi pembangunan manusia disuatu wilayah (Digdowiseiso & Damayanti, 2021). Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal selain untuk memberikan pemerataan fungsi pelayanan kepada seluruh masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Kemandirian fiskal menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam memenuhi secara mandiri segala kebutuhan kegiatan pemerintahannya, baik untuk pembangunan daerah hingga pemberian pelayanan kepada masyarakat. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam atau ekonomi yang kuat, memiliki lebih banyak peluang untuk mencapai kemandirian fisik daerah yang lebih baik (Azwar, 2021).

Provinsi Lampung memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Letak wilayahnya yang strategis menjadikan wilayah ini sebagai pintu gerbang sebelum memasuki Pulau Sumatera. Selain itu, kekayaan alamnya yang berlimpah serta tempat pariwisata yang beragam (Pemerintah Provinsi Lampung, 2021). Besarnya potensi wilayah ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dikembangkan. Harapannya melalui potensi yang dimiliki dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya agar menjadi daerah yang mandiri serta meminimalkan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat.

Tabel 1.3 Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tulang Bawang	0,0728	0,0835	0,0972	0,1064	0,0979
Pringsewu	0,0741	0,0903	0,0951	0,1096	0,1183
Way Kanan	0,0470	0,0533	0,0571	0,0583	0,0599
Tulang Bawang Barat	0,0349	0,0456	0,0534	0,0588	0,0602
Mesuji	0,0530	0,0655	0,0694	0,0801	0,0945
Lampung Selatan	0,1317	0,1399	0,1510	0,1379	0,1557
Lampung Tengah	0,0785	0,0805	0,0958	0,0806	0,0879
Lampung Barat	0,0614	0,0639	0,0743	0,0660	0,0698
Lampung Timur	0,0730	0,0821	0,0803	0,0930	0,0903
Lampung Utara	0,0717	0,0692	0,0677	0,0390	0,0617
Tanggamus	0,0477	0,0503	0,0613	0,0288	0,0343
Pesawaran	0,0545	0,0623	0,0700	0,0655	0,0705
Bandar Lampung	0,2847	0,2694	0,2789	0,2760	0,3005
Pesisir Barat	0,0362	0,0362	0,0372	0,0227	0,0296
Metro	0,1977	0,2603	0,3110	0,2741	0,3075

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024 (diolah)

Terlihat pada Tabel 1.3 kemandirian fiskal daerah selama tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diketahui hanya terdapat dua kota yang memiliki tingkat kemandirian fiskal pada rentang 0,25 – 0,50 (indeks) atau berada dalam kategori daerah menuju mandiri, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sedangkan 13 kabupaten lainnya memiliki tingkat kemandirian fiskal pada rentang 0,00 – 0,25 (indeks) atau terbilang dalam kondisi daerah yang belum mandiri. Besarnya nilai kemandirian fisik tersebut menandakan bahwa seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung masih memiliki kemampuan keuangan tergolong rendah untuk mendanai seluruh kegiatan pemerintahannya.

Daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang semakin tinggi mengartikan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan yang semakin besar dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya melalui penggunaan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal disuatu daerah seharusnya dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pembangunan manusia sangatlah penting untuk diperhatikan, angka IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung memperlihatkan fakta bahwa masih belum meratanya kualitas hidup masyarakat antar kabupaten/kotanya. Hal ini menandakan bahwa peran pemerintah belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah diharapkan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayah. Namun, hal tersebut belum terlaksana. Pada belanja pemerintah di daerah yang tinggi juga tidak selalu menjamin angka IPM yang lebih tinggi pula. Disamping itu, meskipun kemandirian fiskal daerah dan belanja pemerintah menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, hal tersebut masih memperlihatkan angka IPM di Provinsi Lampung merupakan yang terendah atau tertinggal diantara provinsi lainnya di Pulau Sumatera.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal Terhadap IPM Di Kabupaten/Kota Lampung Pada Tahun 2014-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pengaruh belanja pemerintah dan kemandirian fiskal terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2014-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari belanja pemerintah dan kemandirian fiskal terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2014-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai hubungan belanja pemerintah, kemandirian fiskal daerah dan IPM sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan/referensi serta perbandingan untuk penelitian selajutnya yang berhubungan dengan pembangunan manusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memaksimalkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya melalu potensi yang ada di Kabupaten/Kota Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. R. K., & Utomo, Y. P. (2023). Analysis of Factors Influencing the Quality of Human Resources in Kalimantan Province in the Period of 2015 – 2023. *Jurnal Inovasi Pembangunan*, 12(3), 1–9.
- Aprilianti, R., Messakh, G. C., Asiah, S. N., & Nohe, D. A. (2022). *Analisis Regresi Data Panel pada Kasus Persentase Kemiskinan di Kalimantan Timur*. 211–223.
- Ayu, D., Daulay, M., & Gowasa, R. K. (2024). Dinamika Perekonomian Indonesia : sebuah Tinjauan Historis dari Sentralisasi ke Desentralisasi. *Medan Resource Center*, 1(2), 36–42. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i2.1299>
- Azwar. (2021). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 1–25.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022. BPS. <https://www.bps.go.id/id>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). Indeks Pembangunan Manusia 2020. BPS, Jakarta. <https://www.bps.go.id/id>
- Bakar, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 4(2), 16–39.
- Basuki, A. T. (2018). Pengantar Ekonometrika (Dilengkapi Penggunaan Eviews), Edisi Pertama, Danisa Media, Yogyakarta
- Basuki, A. T., & Prawoto. N. (2016). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews. Jakarta: Rajawali Pers.
- Coccia, M. (2021). Effects of Human Progress Driven by Technological Change on Physical and Mental Health. *Studi Di Sociologia*, 2, 113–132. <https://doi.org/10.26350/000309>
- Dewi, N. W. D. M. K., & Urmilah, M. H. (2020). Pengaruh Belanja Daerah dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan

- Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, 10(1), 334–360.
- Digdowiseiso, K., & Damayanti, N. N. (2021). Faktor-faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(3), 183–196.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Alokasi dan Realisasi TKD. Kementerian Keuangan, Jakarta
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Ringkasan APBD. Kementerian Keuangan, Jakarta
- Faturani, Y., & Dona, E. (2023). Berpengaruhkah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia? *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(2), 168–178. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.247>
- Haque, M. I., & Khan, M. R. (2019). Role of Oil Production and Government Expenditure in Improving Human Development Index: Evidence from Saudi Arabia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(2), 251–256. <https://doi.org/10.32479/ijeep.7404>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, F. E., et al. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Hasibuan, L. S., Rujiman, & Sukardi. (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(2), 139–141.
- Hendrich, M., Marwa, T., Fuadah, L. L., & Siddik, S. (2024). The Impact of Regional Expenditures on the Quality of Human Development in South Sumatra. *KnE Social Sciences*, 2024, 74–85. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i14.16094>
- Hera, M. H. G. D., & Asmara, K. (2024). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2023. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 8, 28–36.
- Hidayat, R., Paga'ga, R., & Ningsi. (2022). Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 - 2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi*, 2(2).
- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan, dan Teknologi terhadap IPM di

Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, 23, 122–137.

Honggara, A., & Jamaluddin. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 3(1), 1–12.

Irfan, M., Levina, F. C., & Davisto, G. R. (2024). Transparansi Penggunaan APBD dalam Penggunaan Infrastruktur Daerah. *Jurnal Hukum Masa Kini*, 01(1).

Irwansyah, M., & Aidid, M. K. (2021). Analisis Regresi Balanced Panel dengan Komponen Galat Dua Arah pada Kasus Melek Huruf Masyarakat di Provinsi NTB. *Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 3(1), 10–22. <https://doi.org/10.35580/variasiunm14644>

Kusumaningtyas, E., Sugiyanto, Subagyo. E., Adinugroho. W.C., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, Syah, S., 2022. Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews. Academia Publication, Situbondo.

Lumi, A. N. M. L., Kindangen, P., & Rorong, I. P. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (Studi pada 8 kabupaten di Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 23(2), 69–93.

Mangkoesebroto, G. (2016). Ekonomi Publik, Edisi Ketiga, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

Masduki, U., Rindayati, W., & Mulatsih, S. (2022). How can Quality Regional Spending Reduce Poverty and Improve Human Development Index? *Journal of Asian Economics*, 82, 101515. <https://doi.org/10.1016/J.ASIECO.2022.101515>

Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 116–121. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p116-121>

Miranda, A., Rizal, Y., & Mardhani, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Penelitian Ekonomi*, 6(25), 121–128.

Wahyuni, M. (2020). Statistik Deskriptif. Olah Data Manual dan SPSS Versi 25, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta.

- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 212–222.
- Palayukan, M. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 74–91. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.376>
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2021). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Provinsi Lampung, Teluk Betung, Lampung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahma, F., Yunarsi, Fatmala, W., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 55–61. <https://doi.org/10.57151/jeko.v1i2.9>
- Rangkutya, D. M., Yusuf, M., & Pasaribu, R. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 42–52. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2640>
- Rohima, Siti. (2020). Ekonomi Publik, Universitas Sriwijaya, Palembang
- Rosmadayanti, D., Imaningsih, N., & Wijaya, R. S. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(1), 6.
- Rusydi, B. U., Maulia, C. N., & Hasbiullah. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan. 2, 97–110.
- Sari, F. N., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pemabangunan Manusia pada kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(e-ISSN: 2460-0585), 1–16.
- Satriawan, S. D., & Sirat, A. H. (2021). The Effect of Financial Performance on Human Development Index of Districts and Cities Governments in North

Maluku Province. *Research Journal of Finance and Accounting*, 12(18), 87–95. <https://doi.org/10.7176/RJFA/12-18-09>

Setiawan, A., & Fikriah. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4), 212–221.

Singh, R., Bhattacharjee, S., & Nandy, A. (2024). Fiscal Decentralization for the Delivery of Health and Education in Indian States: an Ongoing Process is more Desirable than a Policy Shift. *Journal of Policy Modeling*, 46(2), 254–271. <https://doi.org/10.1016/J.JPOLMOD.2024.01.006>

Siregar, H. A. (2023). Aspek Kinerja Keuangan Daerah yang Berdampak pada Pembangunan Manusia di Daerah Pemekaran. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(2), 157–167. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i2.5530>

Solikin, A. (2019). Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) di Negara Sedang Berkembang : Tinjauan Sistematis. 2(1), 65–89.

Tinambunan, W. D. (2022). Tinjauan Politik Hukum Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2146>

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wibawa, G. R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah kabupaten dan kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 3(2), 88–100.

Wibisono, C., Indrawan, M. G., & Satriawan, B. (2022). The Effect of Financial Performance on the Human Development Index Moderated Economic Growth in Regency / City in the Province of Riau Island. *International Journal of Educational Review, Law and Social Science*, 2(5), 633–650.

Winarti, V. P., Fyesya Erliantari, & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten 2017 – 2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 155–163. <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v4i2.454>